



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Kabupaten Pati perlu menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat berkesinambungan, efektif dan efisien dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJPD Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pati untuk masa 20 tahun ke depan terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

Isi beserta uraian RPJPD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati yang memuat program pembangunan daerah.

- (2) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Bupati dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesatuan.
- (3) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006-2011 dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Agustus 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan proses berkesinambungan dan terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang sistematis dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara komprehensif berdasarkan jangka waktu yang diperlukan sesuai prioritas dan sasaran pembangunan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2025.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten adalah untuk merumuskan cita-cita, visi, misi, arah dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang yang terintegrasi dengan tujuan nasional secara terpadu, berkesinambungan, representatif dan akuntabel serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

Dokumen RPJPD Kabupaten digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dijabarkan kedalam RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tahunan yang merupakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pati yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025 bertujuan untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Pati menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan segenap *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun mulai Tahun 2005-2025, dan untuk memenuhi konsistensi bahwa RPJPD Kabupaten Pati merupakan sub sistem RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 dan juga sub sistem RPJPNasional 2005-2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 .

RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yang substansinya memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan merupakan kelanjutan dari agenda pembangunan yang disusun secara sistematis melalui tahapan lima tahunan (RPJMD) dan tahunan (RKPD), sehingga pelaksanaan pembangunan daerah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terukur demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Penyusunan RPJPD Kabupaten Pati antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 5)

C. Hubungan antar Dokumen RPJPD Kabupaten Pati dengan Dokumen Perencanaan lainnya

RPJPD Kabupaten Pati merupakan satu sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan, penyusunan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 mengacu pada arah pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

Agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang, maka dalam menyusun RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 telah disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati.

Dokumen RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pati bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada masa jabatannya.

D. Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005–2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV : Visi dan Misi Daerah

BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

E. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro, dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang penyusunannya memperhatikan dinamika perubahan masyarakat melalui pendekatan : Teknokratik, Politik, Partisipatif, Atas-Bawah (*Top-Down*), dan Bawah-Atas (*Bottom-Up*) yang merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan yang lebih efektif, efisien dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Tujuan disusunnya RPJPD Kabupaten Pati sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Selain tujuan di atas, RPJPD Kabupaten Pati juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah dan Program Kepala Daerah terpilih serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. KONDISI PADA SAAT INI

Kabupaten Pati secara geografis terletak antara 110°50' - 111°15' Bujur Timur dan 6° 25' - 7°00' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 150.368Ha terdiri dari 58.917Ha lahan sawah dan 91.451 Ha lahan bukan sawah. Kabupaten Pati berjarak 75 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang), panjang garis pantai 60 km dengan batas wilayah yaitu :

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.
Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.

Secara administratif Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan, 401 Desa dan 5 Kelurahan, dengan jumlah RW 1.464 dan RT 7.519. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo dengan luas 15.874 Ha dan terkecil adalah Kecamatan Wedarijaksa dengan luas 4.085 Ha.

Kondisi wilayah Kabupaten Pati secara umum terdiri dari dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Sebelah utara merupakan lereng pegunungan Muria dan pantai, sedangkan sebelah selatan merupakan wilayah sedimentasi pegunungan Kendeng Utara.

Kabupaten Pati memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu rata-rata 23° C - 35° C dan curah hujan tertinggi 1.664 mm dengan 89,5 hari hujan.

Wilayah Kabupaten Pati mempunyai ketinggian daratan 0 sampai dengan 1.280 meter, dengan rata-ratanya \pm 17 meter di atas permukaan air laut.

Secara umum, wilayah Kabupaten Pati terbagi dalam lima wilayah ketinggian, yaitu sebagai berikut :

1. Dataran rendah yang terdapat di Kabupaten Pati mempunyai ketinggian 0-7 meter dari permukaan laut (m dpl). Wilayah ini meliputi Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Pati, Kecamatan Jaken, sebagian Kecamatan Sukolilo, sebagian Kecamatan Kayen, sebagian Kecamatan Tambakromo, sebagian Kecamatan Pucakwangi, sebagian Kecamatan Margorejo, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana serta Kecamatan Wedarijaksa.

2. Ketinggian antara 7-100 m dpl, meliputi Kecamatan : sebagian kecil Kecamatan Sukolilo, sebagian Kecamatan Kayen, sebagian Kecamatan Tambakromo, sebagian Kecamatan Winong, sebagian Kecamatan Pucakwangi, sebagian Kecamatan Margorejo, sebagian Kecamatan Tlogowungu, sebagian Kecamatan Gunungwungkal dan sebagian Kecamatan Cluwak.
3. Ketinggian antara 100-500 m dpl, meliputi sebagian Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Winong, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Pucakwangi.
4. Ketinggian 500-1000 m dpl, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Cluwak.
5. Ketinggian > dari 1000 m dpl adalah sebagian wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Gunungwungkal.

Hidrologi di Kabupaten Pati terdiri dari air permukaan tanah dan air bawah tanah. Air permukaan tanah di Kabupaten Pati mencakup waduk, bendungan. dan sungai-sungai yang berpotensi sebagai sumber air. Kabupaten Pati mempunyai dua waduk yaitu Seloromo dan Gunungrowo. Sedangkan sungai yang berada di Kabupaten Pati bagian utara adalah Sungai Sani, Simo, Kersulo, Bapoh, Tayu, Sat, Brati dan Juwana. Adapun sungai yang berada di wilayah Pati bagian selatan antara lain adalah Sungai Widodaren, Brati, Lembang, Godo, Gono, Kedunglo dan Sentul. Sedangkan yang termasuk air bawah tanah yang diusahakan untuk sumber air minum maupun pengairan adalah terletak di 4 (empat) kecamatan yaitu: sumber air Widodaren, Sendangsoko, Bulu dan Lunggoh di Kecamatan Pucakwangi; sedangkan di Kecamatan Tambakromo meliputi sumber air Maitan, Dogo dan Pakis; Kecamatan Kayen mempunyai sumber air Kluweh, Mangin dan Beketel; di Kecamatan Sukolilo meliputi sumber air Lawang, Goa Wareh, Prawoto, Baleadi.

Jenis tanah di bagian Utara Kabupaten Pati terdiri dari tanah Red Yellow mediteran, Latosol, Alluvial, Hidromer dan Regosol, sedangkan bagian Selatan terdiri dari tanah Alluvial, Hidromer dan Grumosol.

Rincian jenis tanah menurut kecamatan seperti di bawah ini :

1. Kecamatan Batangan, merupakan termasuk pada jenis tanah alluvial.
2. Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Gembong merupakan tanah latosol.
3. Kecamatan Juwana dan Kecamatan Margoyoso merupakan tanah alluvial, mediteran coklat tua dan mediteran coklat.
4. Kecamatan Pati dan Kecamatan Margorejo merupakan tanah red yellow mediteran, latosol, alluvial dan hidromer.

5. Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo merupakan tanah alluvial dan hidromer.
6. Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong merupakan tanah grumosol dan hidromer.
7. Kecamatan Wedarijaksa merupakan tanah mediteran coklat tua, mediterane coklat, alluvial dan grumosol.
8. Kecamatan Tayu merupakan tanah alluvial, mediteran coklat tua, mediteran coklat, dan regosol.
9. Kecamatan Tlogowungu merupakan tanah latosol dan red yellow mediteran.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi(Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Guna mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Usia Harapan Hidup (UHH), perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita.

IPM Kabupaten Pati pada tahun 2004 sebesar 70,6 meningkat menjadi 70,9 pada tahun 2005. Lebih rinci capaian komponen pembentuk IPM adalah untuk UHH meningkat dari 72,5 (2004) menjadi 72,6 (2005), Angka Melek Huruf meningkat dari 83,8 % (2004) menjadi 84,3 % (2005), rata-rata lama sekolah dari 6,2 (2004) menjadi 6,4 (2005) dan Pengeluaran Riil Per Kapita tercatat sebesar Rp 632.400,00 (2004) meningkat menjadi Rp 632.800,00 (2005).

Meningkatnya UHH di Kabupaten Pati antara lain disebabkan oleh semakin baiknya pelayanan medis, terutama pertolongan kelahiran pertama, dan meningkatnya jumlah balita yang lama menyusunya sampai 24 bulan lebih.

Meningkatnya angka melek huruf berkat keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang mendorong meningkatnya angka melek seperti penyediaan fasilitas belajar, guru dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun.

IPM Kabupaten Pati pada tahun 2004 (70,6) jika dirujuk ke kategori tingkat Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke-11 kategori tingkat kabupaten/kota dan diatas IPM Provinsi Jawa Tengah 68,8.

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada Tahun 2001 sebesar 1.180.736 jiwa, terdiri dari 581.960 jiwa penduduk laki-laki dan 598.776 jiwa penduduk perempuan. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2004 sebesar 1.218.267 jiwa, terdiri dari 600.700 jiwa penduduk laki-laki dan 617.567 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2004 mencapai 0,79%, tingkat pertumbuhan ini termasuk kategori rendah. Selama kurun waktu 2001-2004, sex ratio atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tidak mengalami perubahan yang berarti, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sedangkan angka kepadatan penduduk selama tahun 2001-2004 rata-rata sebesar 810 jiwa/km², termasuk tingkat kepadatan cukup, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah lebih rendah, yaitu sebesar 980 jiwa per km².

Persebaran jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pati sebesar 103.483 jiwa dengan jumlah laki-laki 50.415 jiwa dan perempuan 53.068 jiwa, dan yang terendah berada di Kecamatan Gunungwungkal sebesar 35.116 jiwa dengan jumlah laki-laki 17.244 jiwa dan perempuan 17.872 jiwa. Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan, dengan demikian penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak dan sekaligus penikmat hasil-hasil pembangunan.

Dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa untuk kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,01 % dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 31,99% .

Crude Birth Rate (CBR) yaitu angka kelahiran kasar rata-rata penduduk (anak-anak) yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama usia produktif (15-49) pada tahun 2001-2004 sebanyak 9. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif pada tahun 2001 tercatat sebanyak 72% dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 77,87% dengan rincian yang menggunakan metode KB suntik sebanyak 130.521 (82%) dan implan/susuk sebanyak 20.083(18%). Peserta KB Aktif Mandiri pada tahun 2001 sebanyak 183.826 meningkat menjadi 202.209 pada tahun 2004 atau mengalami peningkatan sebanyak 18.383 (10%).

Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan antara lain melalui pelayanan KB, peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan keikutsertaan pria dalam ber-KB dan penguatan jaringan program.

b. Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 sebanyak 824.563 orang dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 828.898 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 4.335 orang (0,53 %).

Penduduk Kabupaten Pati yang bekerja di sektor pertanian tahun 2005 sebanyak 238.532 orang (28,7%) atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004 yang tercatat sebanyak 290.036 orang (35,1%) kemudian industri 9,1% (2004) menjadi 7,9% (2005), keuangan 0,7% (2004) menjadi 0,9% (2005) dan sektor perdagangan 11,03% (2004) menjadi 17,66% (2005).

Upaya perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran telah dilakukan, antara lain melalui penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, penyelenggaraan bursa kerja, dan pengembangan informasi tenaga kerja. Adapun upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan kerja dan pemagangan.

Upaya perluasan kesempatan kerja juga dilakukan melalui program transmigrasi. Banyaknya jumlah transmigran dari Kabupaten Pati tahun 2003 sebanyak 98 KK (297 jiwa), tahun 2004 tercatat sebanyak 37 KK (117 jiwa) dan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 15 KK (52 jiwa) terdiri dari transmigrasi biasa dan transmigrasi swakarsa mandiri. Pelaksanaan program transmigrasi tidak semata-mata ditekankan pada target pemindahan penduduk, tetapi pada pencapaian kesejahteraan transmigran dan perannya dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah penempatan.

c. Pendidikan

Dalam kerangka pembangunan bangsa, pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan di Kabupaten Pati yang telah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia melalui pengembangan dan peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pati selain memerhatikan sistem pendidikan nasional memperhatikan sasaran-sasaran komitmen internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran *Millenium Development Goals (MDG's)* dan Kesepakatan Dakar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS). Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pati selain dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Jalur pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan non formal antara lain Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) dan Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK).

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Pati, salah satunya dapat diukur melalui jumlah anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun ajaran 2005/2006, untuk SD/ sederajat meningkat sebesar 0,55 % dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu sebesar 116,46 %, sehingga telah melebihi standar ideal indikator pemerataan pendidikan. Tingkat SMP/ sederajat sebesar 98,29 % atau meningkat sebesar 0,76 % dari tahun ajaran sebelumnya dan SMA/ sederajat tahun ajaran 2005/2006 sebesar 46,36 %, terjadi peningkatan sebesar 0,49 % dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 45,87 %. Untuk pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM), pada tahun ajaran 2005/2006 pada SD/ sederajat sebesar 98,59 % meningkat sebesar 0,02 % dari tahun ajaran sebelumnya, sedangkan untuk SMP/ sederajat sebesar 69,01 % atau meningkat sebesar 4,39 % dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 75,89 % serta pada SMA/ sederajat sebesar 33,74 % atau meningkat sebesar 0,38 % dari tahun ajaran sebelumnya.

Indikator lain dari perkembangan pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Putus Sekolah/Drop Out (DO). Angka DO SD pada tahun 2005/2006 tercatat sebesar 0,10 % turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,18 %. Pada kurun waktu yang sama, untuk SMP tercatat sebesar 0,61 % turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,69 %, sedangkan untuk SMA tercatat sebesar 0,62 % turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,63 %.

Pada tahun ajaran 2005/2006 Kabupaten Pati memiliki 893 unit SD/MI dengan jumlah guru sebanyak 6.638 orang dan sebanyak 131.061 siswa. Untuk tingkat SMP/MTs/ sederajat terdapat 194 unit sekolah, dengan guru sebanyak 2.265 orang dan jumlah siswa sebanyak 39.294 orang. Tingkat SLTA/SMK/MA terdapat 73 unit sekolah dengan guru sebanyak 950 orang dengan murid sebanyak 25.658 orang.

d. Perpustakaan

Mencerdaskan kehidupan masyarakat juga dilakukan melalui penyediaan layanan kondisi perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

Kondisi perpustakaan umum dan daerah Kabupaten Pati menunjukkan kecenderungan meningkat dari sisi koleksi, pengunjung dan fasilitas layanan. Jumlah perpustakaan umum yang ada di Kabupaten Pati pada tahun 2005 mencapai 1 unit. Koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati berjumlah 10.463 buah dengan pengunjung mencapai 2.411 orang. Layanan perpustakaan keliling mencapai 1 unit dan baru mampu menjangkau 4 Kecamatan di Kabupaten Pati.

e. Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Pati memiliki prasarana dan sarana olah raga yang terdiri dari gedung olah raga sebanyak 2 unit, lapangan olah raga sebanyak 24 unit, sarana olah raga lain (kolam renang dan bulu tangkis) sebanyak 47 unit.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Pati relatif maju, terutama di bidang bulu tangkis dan atletik. Pembangunan bidang olah raga secara kuantitas kelembagaan organisasi olah raga menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2000-2005 prestasi olahraga di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan. Jumlah cabang olah raga bertambah sebanyak 15 cabang olah raga, dengan cabang olah raga unggulan sebanyak 7 cabang yaitu Sepak Bola, Senam, Atletik, Sepak Takraw, Catur, Wushu dan Panjat Tebing.

f. Kesehatan

Pembangunan Bidang Kesehatan merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, pada tahun 2005 telah disediakan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan yang memadai, yaitu dengan tersedianya pusat pelayanan kesehatan yang berupa : 29 Puskesmas, 50 Puskesmas pembantu, 29 Puskesmas keliling, Polindes 107 buah, Pos Kesehatan Desa (PKD) 156 buah yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Kecamatan. Adapun rumah sakit umum 6 buah, Rumah Sakit bersalin 9 buah, Balai pengobatan 26 buah serta apotik 33 buah.

Sedangkan untuk tenaga medis dan para medis sebanyak 88,03%, ahli farmasi (3,08%), ahli gizi (2,87%), ahli sanitasi (2,87%), ahli kesehatan masyarakat (3,15%).

Disamping tersedianya sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan juga ditentukan oleh tingginya minat dan kepedulian masyarakat yang didukung adanya sistem manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan yang efektif, adanya operating prosedur pelayanan medis serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan.

g. Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pati dari Tahun 2004-2005 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2004 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang tercatat di Kabupaten Pati adalah 137.040 orang menurun pada Tahun 2005 menjadi 121.757 orang. Pada Tahun 2004 jumlah penyandang cacat mencapai 2.670 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 5.138 orang, tuna susila sebanyak 62 orang, pengemis sebanyak 61 orang dan gelandangan sebanyak 25 orang serta jumlah fakir miskin sebanyak 105.628 orang.

Pemecahan permasalahan sosial kemasyarakatan cukup kompleks, karena jumlahnya cukup besar dan saling tumpang tindih antara kemiskinan, kerentanan, cacat, penyakit kronis dan penyakit menular serta anak-anak terlantar. Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi penanganan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan serta profesional. Sebagai upaya penanganan PMKS di Kabupaten Pati baru terdapat 1 unit panti sosial anak dan 1 unit panti sosial petirahan anak, serta 9 unit panti sosial yang dikelola oleh swasta.

h. Kemiskinan

Kabupaten Pati tahun 2004 jumlah penduduk miskin sebesar 194.432 KK dengan persentase 40,17% sedangkan tahun 2005 penduduk miskin sebanyak 190.543 KK dengan persentase 38,89%. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan. Berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Pati.

Upaya riil yang telah ditempuh sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati adalah 1) pengurangan beban biaya bagi penduduk miskin dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan

mendukung kegiatan sosial ekonomi, dan 2) meningkatkan pendapatan atau daya beli penduduk miskin melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya maupun politik. Bentuk riil tersebut dilaksanakan melalui program antara lain Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

i. Kebudayaan

Kabupaten Pati memiliki banyak kekayaan seni dan budaya yang muncul dari karakteristik masyarakat yang beragam. Kesenian yang ada di Kabupaten Pati antara lain kesenian tradisional yaitu Ketoprak, Tayub, Wayang Purwa, Wayang Topeng, Mandiling, Terbang Jidor, Pencak Pencik, Genjring, Angguk, Kentrung, Barongan, Cokekan, Karawitan, Rebana dan Keroncong. Selain kelompok seni tradisional dan kelompok kesenian, di Kabupaten Pati juga terdapat sanggar musik dan seni antara lain Sanggar Musik, Sanggar Tari, Sanggar Rupa/ Lukis, Karawitan dan Sanggar Seni Pedalangan/Wayang Kulit. Kesenian tersebut merupakan aset budaya dan kekayaan Kabupaten Pati. Jumlah kelompok kesenian keseluruhan pada Tahun 2002 sebanyak 75 kelompok dan pada Tahun 2005 sebanyak 95 kelompok yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati.

Selain itu terdapat peninggalan sejarah yang tersebar di masyarakat antara lain Pintu Gerbang Mojopahit, Sendang Sani, Makam Pragola, Makam Tombronegoro, Makam Tondonegoro, Peninggalan Kadipaten di Kemiri, Masjid Gambiran, Makam Saridin, Makam Kyai Mutamakin dan Rumah Dinas Residen Pati.

Kabupaten Pati juga memiliki keragaman budaya meliputi Meron, Sedekah Bumi/Bersih Desa, Larungan dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati. Untuk memperkaya dan memperkenalkan keragaman budaya Kabupaten Pati pernah mengirimkan duta-duta kebudayaan baik luar daerah, tingkat nasional dan mancanegara.

Aspek budaya Kabupaten Pati ini merupakan modal dasar sekaligus kearifan lokal yang sangat penting dan potensial bagi Kabupaten Pati untuk mengembangkan diri dalam jangka panjang tanpa harus tercabut dari akar budayanya. Pembangunan yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari budaya asing dan globalisasi yang kontraproduktif dengan nilai-nilai budaya lokal.

j. Agama

Kehidupan beragama di Kabupaten Pati selama ini berlangsung dalam toleransi yang cukup tinggi yang ditandai dengan rasa toleransi yang tinggi di antara pemeluk agama. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di sekitar warga yang majemuk, seperti masjid, gereja, vihara, dan pura. Jumlah tempat ibadah pada tahun 2005 mencapai 7.519 buah yang terdiri atas 810 masjid dan musholla, sebanyak 6.363, gereja Kristen dan Katholik sebanyak 117 dan lainnya berupa pura sebanyak 1 dan 28 vihara . Jumlah pondok pesantren tahun 2005 tercatat sebanyak 67 unit dengan 1.139 ustad, 67 kiai, dan 17.219 santri. Jamaah haji pada tahun 2005 memenuhi kuota yaitu sebanyak 683 orang.

k. Perempuan dan anak

Kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di era otonomi daerah merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini sesuai dengan komitmen nasional dengan menandatangani beberapa konvensi internasional yang memberikan dasar kuat tentang peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak, melalui ratifikasi Konvensi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention for Eliminations and Determination Against Women/CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1987, menandatangani hasil Konvensi Internasional tentang Perempuan di Beijing, menandatangani Konvensi No.100 Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang mengisyaratkan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama.

Kekerasan berbasis gender merupakan "fenomena gunung es", dimana kasus yang dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya terjadi, sehingga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, agar dilaksanakan deseminasi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerja perlu semakin ditingkatkan.

2. Ekonomi

a. Kondisi dan Struktur Ekonomi

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Pati semakin membaik. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 3,94%, sedangkan tahun 2001 sebesar 3,41%; Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 atas dasar harga konstan sebesar Rp.3.786.140,34 juta dibanding tahun 2001 baru mencapai Rp.3.307.260,06 juta yang berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Perdagangan merupakan sektor terbesar ketiga dalam komposisi PDRB Kabupaten Pati setelah sektor pertanian dan industri manufaktur. Dari sektor ini pada umumnya sumber pendapatan potensial daerah berasal yaitu berupa retribusi. Ada tiga kategori/skala perdagangan di Kabupaten Pati yaitu skala besar, menengah dan kecil. Jumlah pedagang yang aktif melakukan kegiatannya cenderung mengalami pasang surut. Jumlah pedagang kecil mencapai 1.067 pedagang dan ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan tahun-tahun yang lain. Untuk pelaku perdagangan skala menengah dan besar mencapai jumlah terbanyak pada Tahun 2004 yaitu 138 pedagang menengah dan 57 pedagang besar.

Adapun jenis sarana pendukung perdagangan atau pasar yang terdapat di Kabupaten Pati adalah 19 unit pasar tradisional, 15 unit pasar lokal, 5 unit pasar swalayan, 4 unit pasar grosir dan 3 unit mall/plaza.

b. Industri

Industri dalam pengertian industri pengolahan (*manufacturing industry*) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu memberikan *value added* yang tinggi sehingga mampu mendongkrak nilai nominal produk dan peranannya dalam penyerapan tenaga kerja.

Industri di Kabupaten Pati terdiri dari pengolah hasil pertanian (dalam arti luas) dan industri logam. Perkembangannya dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan bahwa industri yang mengolah bahan baku hasil pertanian untuk kategori industri menengah, meningkat dari 26 unit tahun 2001, menjadi 39 unit di Tahun 2004.

Adapun industri-industri yang tergolong kecil / mikro baik industri pengolahan hasil pertanian maupun logam relatif berkembang cukup pesat. Industri pengolah hasil pertanian dari tahun 2001 hingga tahun 2004 bertambah sebanyak 263 unit atau tumbuh hampir 66% yaitu dari 397 unit

menjadi 660 unit. Sedangkan industri logam dalam periode yang sama bertambah 229 unit atau tumbuh 79% (dari 290 unit meningkat menjadi 519 unit).

c. Koperasi dan UMKM

Di Kabupaten Pati, jumlah koperasi (koperasi primer) yang aktif dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan terutama sejak tahun 2004, jumlah koperasi primer yang masih beroperasi pada tahun 2001 sebanyak 487 unit dan terus menurun hingga Tahun 2004 menjadi sebanyak 404 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada Tahun 2001 sebanyak 3.113 orang dan pada tahun 2004 tenaga yang terserap menurun dibandingkan tahun 2001 menjadi 1.975 orang. Jumlah modal koperasi pada posisi tahun 2001 sebesar Rp.143.575.466.000,-. Jumlah ini terus meningkat hingga Tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 164.445.606.000,-

Selama tiga tahun (2002-2005) industri manufaktur/usaha skala menengah dan kecil di Kabupaten Pati mengalami pertumbuhan yang positif baik jumlah usaha maupun penambahan modal. Usaha skala menengah, Tahun 2002 sebanyak 25 unit dengan jumlah modal Rp.20,8 milyar, pada Tahun 2005 meningkat menjadi 83 unit dengan jumlah modal Rp.113,95 milyar.

d. Investasi

Investasi atau penanaman modal sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daerah, meliputi kondisi politik, sosial, dan ekonomi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal ini merupakan manifestasi dari kualitas atau daya saing daerah.

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari Tahun 2002 hingga 2005, secara nominal investasi di Kabupaten Pati selalu mengalami peningkatan dari Rp. 1,149,000,000 menjadi Rp.7,712,000,000 industri menengah sedangkan industri kecil dari Rp.557,525 menjadi Rp.5,243,440,000. Total investasi di Kabupaten Pati Tahun 2002 sebesar Rp.1.706.525.000,- dan pada Tahun 2005 meningkat sebesar Rp.7.573.155.000,- atau tumbuh sekitar 343,78%. Peningkatan sebesar ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi Industri Kecil/Mikro yang mencapai 735,21%.

Era otonomi daerah yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun, memberikan kesempatan daerah untuk lebih kreatif dalam menggali dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pati lebih responsif terhadap kebutuhan para investor sehingga menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya

peningkatan investasi menunjukkan bahwa Kabupaten Pati mempunyai iklim usaha sekaligus daya saing daerah yang lebih dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah yaitu semakin meningkatnya kesempatan kerja, berkurangnya pengangguran, meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan yang semuanya akan bermuara pada menurunnya angka kemiskinan.

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pati telah mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan mendorong berkembangnya sektor riil.

e. Pertanian

Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan (padi, dan palawija) didukung oleh lahan produksi yang cukup potensial, yaitu pada tahun 2000-2001 luas areal sawah untuk tanaman padi sebesar \pm 95 ribu ha dengan produksi gabah kering produksi (GKP) \pm 470 ribu ton atau \pm 420 ribu gabah kering giling (GKG). Sedangkan tanaman jagung diproduksi di lahan seluas \pm 12 ribu ha dengan total produksi sebesar \pm 38 hingga 40 ribu ton. Adapun tanaman kedelai dibudidayakan di atas lahan seluas \pm 3,3 ribu ha yang menghasilkan produksi kedelai sebesar \pm 4.500 ton, sedangkan tanaman singkong diproduksi di lahan seluas \pm 14 ribu ha dengan produksi sebesar \pm 366 ribu ton. Dengan luasan lahan sawah yang cukup besar ini menunjukkan aktivitas pertanian merupakan potensi yang harus tetap dipertahankan dan diupayakan untuk dapat terus berkembang.

Berdasarkan data, kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Pati Tahun 2004 menunjukkan bahwa perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 68 dari nilai ideal 100. Pada Tahun 2005 komoditas padi 148.690 Ton, jagung 16.952 Ton, kacang hijau 11.823 Ton dan ubi kayu 97.839 Ton, dengan demikian selama kurun waktu 2004-2005 mengalami surplus yang cenderung meningkat dibandingkan komoditas yang lain.

Bidang peternakan Kabupaten Pati memiliki potensi yang besar. Produksi ternak sapi potong lebih besar dari pada sapi perah dengan produksi di tahun 2005 sebesar 68.438 ekor yang banyak didominasi dari Kecamatan Jaken dan Kecamatan Batangan. Sedangkan produksi ternak kambing dan domba tahun 2004-2005 mengalami pertumbuhan yang positif dengan produksi 111.607 ekor sehingga layak untuk dikembangkan mengingat akan tingginya kebutuhan.

f. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang dianugerahi kondisi dan letak geografi yang sangat menguntungkan. Selain merupakan simpul jalur transportasi utama di Pulau Jawa bagian utara, juga mempunyai wilayah pesisir laut yang membentang cukup panjang. Tentunya potensi perikanan menjadi salah satu pendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pati.

Disamping potensi perikanan laut, di Kabupaten Pati juga banyak dikembangkan perikanan darat berupa tambak dan kolam serta ditambah dengan adanya perikanan tangkap yang berasal dari sungai dan waduk.

Produksi perikanan tangkap (tangkapan laut) di perairan Laut Jawa di wilayah Kabupaten Pati cenderung mengalami penurunan akibat dari kelebihan tangkap (*overfishing*), terutama sejak tahun 2003 dimana pada saat itu, produksi tangkapan ikan mencapai 56.880 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.166,35 milyar. Nilai produksi ini sedikit turun 8,5% (Rp.15,5 milyar) dibandingkan tahun sebelumnya meskipun total produksinya lebih besar. Hingga Tahun 2005, total produksi perikanan laut mencapai 35.377 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.150,04 milyar. Nilai inipun masih dibawah capaian pada tahun 2002 yang mencapai Rp.181,85 milyar dengan produksi ikan sebesar 55.931 ton dan juga produksi dan nilai produksi pada tahun 2003.

Adapun perikanan tangkap perairan darat (sungai) produksinya relatif terus meningkat dibandingkan hasil perikanan waduk. Pada tahun 2002, dengan jumlah produksi ikan sungai sebesar 65,9 ton senilai Rp.531,66 juta merupakan hasil perolehan yang paling optimum dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Produksi ikan sungai terus mengalami peningkatan, tapi nilai produknya tidak sejalan dengan peningkatan produksinya atau nilainya cenderung terus menurun. Untuk perikanan waduk, produksi ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi terjadi pada Tahun 2005 dimana produksi ikan pada tahun tersebut mencapai 18,6 ton (jauh di bawah produksi tahun-tahun sebelumnya) namun mempunyai nilai produksi sebesar Rp.144,83 juta.

Pada perikanan budidaya, produksi perikanan tambak cenderung mengalami peningkatan per tahunnya yaitu sebesar 4%. Disisi lain peningkatan produksi ikan ini tidak diikuti dengan nilai jual ikan yang sebanding, terutama untuk produksi tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2004. Kondisi kembali membaik pada awal tahun 2005 dimana jumlah produksi ikan yang mencapai 17.483 ton diikuti dengan harga ikan yang cukup baik yaitu dengan total nilai produksi sebesar Rp.221,40 juta.

Sedangkan perikanan kolam, produksinya mengalami penurunan yang cukup tajam terutama sejak tahun 2003 yang turun sekitar 60% dan nilai produksinya turun sekitar 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

g. Pertambangan

Sumber daya mineral yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Pati adalah bahan galian golongan C. Jenis atau klasifikasi sumber daya mineral yang dimanfaatkan antara lain andesit, batu gamping, pasir dan batu, fosfat, tanah liat, dan trass. Beberapa sumber daya mineral terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati yaitu:

- 1) Fosfat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Tambakromo.
- 2) Batu kapur di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Tambakromo.
- 3) Trass di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak.
- 4) Kalsit di Kecamatan Kayen.
- 5) Kerikil, batu dan pasir sungai, banyak terdapat di sungai-sungai sebelah utara kabupaten meliputi Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong dan Kecamatan Tlogowungu.
- 6) Pasir besi banyak terdapat di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu.

Berdasarkan volume (*tonage*) yang tereka, maka jenis mineral fosfat merupakan yang tertinggi, yaitu 112.840 ton. Sedangkan berdasarkan volume yang terukur jenis trass merupakan sumber mineral tertinggi dengan volume 2.729.888 m³.

Dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan galian C, yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih terdapat kegiatan penambangan yang tidak berizin dan pengelolaannya kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

h. Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Pati selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Berbagai fasilitas pendukung pengembangan perdagangan di Kabupaten Pati telah tersedia dengan memadai dan terus berkembang lebih baik.

Jumlah perusahaan besar yang mendukung kegiatan perdagangan di Kabupaten Pati antara lain PT Dwi Kelinci, PT Garuda Food, PG Trangkil,

PT Mojoagung, PT Misaja Mitra, PT Sampurna Kuningan, PT Sinar Indah Kertas dan PTP Jolong. Hal ini mengindikasikan kegiatan usaha di Kabupaten Pati cukup meningkat.

Data ekspor Kabupaten Pati selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai 26.214.524 US\$ pada tahun 2001 sedangkan pada tahun 2005 menunjukkan nilai ekspor sebesar 12.403.868,61 US\$ dan 202.959 Euro, dari berbagai jenis komoditi antara lain : kuningan, kopi, udang beku, kacang open gula dan *garden furniture*.

i. Pariwisata

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pati mempunyai potensi cukup besar, diantaranya obyek wisata alam sejumlah 6 lokasi (Gunungrowo Indah, Gua Pancur, Gua Wareh, Kebun Kopi Jolong, Sendang Widodari, Air Terjun Grinjingan Sewu dan Air terjun Sepletuk) dengan panorama yang indah dan obyek wisata religius sebanyak 4 lokasi (Makam Saridin/Syeh Jangkung, Makam Syaikh KH. Ahmad Muthamakkin, Makam Syaikh Ronggo Kusumo dan Makam Syeh Sunan Ngerang).

Kunci keberhasilan sektor pariwisata terletak pada komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap pengembangan dan pemasaran obyek wisata unggulan di Kabupaten Pati.

Data statistik kunjungan pariwisata di Kabupaten Pati senantiasa menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan. Pada Tahun 2000 jumlah obyek wisata dari sebanyak 10 obyek dengan jumlah pengunjung 500.045 orang. Tahun 2001 jumlah pengunjung meningkat menjadi 525.155 orang, sedangkan pada tahun 2004 mengalami penurunan jumlah pengunjung.

Keberhasilan sektor pariwisata, selain dilihat dari peningkatan PAD, dapat dilihat pula dari *multiplier effect* serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penyebarluasan informasi secara cepat sudah menjadi komitmen dari pemerintah daerah sehingga sudah semakin banyak satuan kerja pemerintah daerah yang memiliki *website* (<http://www.patikab.go.id>) sebagai media penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjadi media promosi daerah.

Terkait dengan penyebarluasan informasi, di Kabupaten Pati terdapat beberapa lembaga penyiaran publik milik pemerintah daerah dan swasta, sedangkan media massa yang beredar baik media massa nasional maupun

regional, antara lain : Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Seputar Indonesia, Jawa Pos, Kompas dan beberapa surat kabar lainnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan Majalah Pati Bumi Mina Tani sebagai media informasi pembangunan Kabupaten Pati.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang industri yang menggunakan bahan baku lokal.

4. Sarana dan Prasarana

Prasarana jalan di Kabupaten Pati terdiri dari jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2005 panjang jalan kabupaten 666,996 km, dengan kondisi baik sepanjang 306,450 km, panjang jalan provinsi di Kabupaten Pati pada Tahun 2000 mencapai 107,970 km dengan kondisi baik sepanjang 50,840 km, kondisi sedang sepanjang 55,130 km.

Kabupaten Pati juga dilalui jalan nasional sepanjang 35,710 km. Kondisi jalan nasional tahun 2000 sepanjang 22,040 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan rusak sepanjang 7,250 Km.

a. Perhubungan

Kondisi sarana perhubungan di Kabupaten Pati cenderung meningkat. Jumlah kendaraan umum angkutan pedesaan selama kurun waktu 2003-2005 cenderung naik. Jumlah kendaraan angkutan pedesaan (mobil penumpang umum) pada Tahun 2005 sebesar 345 unit.

Jenis kendaraan umum yang ada selama kurun waktu tahun 2003-2005 terdiri dari 138 bus besar, 76 bus sedang, 230 bus kecil dan 245 angkot.

Ijin trayek angkutan selama kurun waktu tahun 2000-2005 cenderung meningkat, baik untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Untuk AKAP pada tahun 2000 sebanyak 1 trayek, AKDP sebanyak 4 trayek dan angkutan pedesaan sebanyak 16 trayek. Tahun 2005 cenderung meningkat yaitu AKAP sebanyak 2 trayek, AKDP sebanyak 4 trayek dan angkutan pedesaan tetap 16 trayek.

Sampai saat ini di Kabupaten Pati belum mempunyai terminal Tipe A. Sejak tahun 2000-2005 baru mempunyai Terminal Tipe B sebanyak 1 buah dan Tipe C sebanyak 2 buah.

Untuk jumlah *traffic light* Tahun 2005 terdapat 11 buah dan jumlah *warning light* sebanyak 32 buah.

b. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan sektor perumahan dan permukiman memiliki tujuan memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menempati rumah yang layak, tersedia air bersih dengan prasarana dan sarana sanitasi yang memadai.

Kondisi empat tahun terakhir perumahan di Kabupaten Pati dengan status kepemilikan rumah milik sendiri terus mengalami peningkatan, pada tahun 2003 sebesar 312.221 unit, tahun 2004 sebesar 347.832 unit dan tahun 2005 sebesar 354.224 unit. Jumlah tersebut baru mencapai 95% dari kebutuhan rumah sebesar 379.507 unit. Sedangkan perumahan yang penyediaannya dari Perumnas, KPR/BTN, Real Estate, penerangan empat tahun terakhir relatif tidak mengalami perubahan yaitu untuk Perumnas 2 unit, KPR/BTN 4 unit dan Real Estate 1 unit. Pesatnya perkembangan permukiman perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga tidak berdampak pada peningkatan limpasan air.

Produksi sampah pada tahun 2003 mencapai $\pm 189,98 \text{ m}^3/\text{hari}$, sedangkan pada tahun 2004 sebesar $\pm 193,02 \text{ m}^3/\text{hari}$. Pada tahun 2004 cakupan pelayanan sampah baru mencapai 92,05% dari volume produksi sampah yang dilayani oleh 63 kontainer diangkat dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pada saat ini Kabupaten Pati baru memiliki 3 unit TPA yaitu TPA Sukoharjo seluas 5 Ha, TPA Sampok (0,1 Ha) dan TPA Plosojenar (0,9 Ha).

c. Sumber Daya Air

Kabupaten Pati memiliki jumlah sungai yang cukup besar jumlahnya, yaitu terdapat 111 sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai berpola kipas atau pohon dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi untuk pengairan dan irigasi. Namun pada musim kemarau kebanyakan sungai-sungai itu mengalami kekeringan, sedangkan pada musim hujan beberapa sungai justru meluap.

Ada beberapa sungai yang memiliki mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari drainase kota saja. Mata air sungai-sungai

umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat di Wilayah Utara Kabupaten Pati. Disamping itu terdapat juga bangunan-bangunan utama sebagai penampung air maupun sumber air sebagai upaya pemenuhan sumber daya air di Kabupaten Pati yang terdiri dari waduk 2 (dua) buah, bendung tetap 201 buah, bendung gerak 12 buah, pengambilan bebas 188 buah, mata air 36 buah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Pemenuhan air bersih masyarakat Kabupaten Pati sebagian besar menggunakan perubahan sumur dangkal maupun sumur dalam dan baru sebagian kecil masyarakat Pati yang menggunakan fasilitas air bersih dari PDAM atau sebesar 15.839 pelanggan, terutama masyarakat Kecamatan Pati dan Juwana, sedangkan masyarakat pedesaan yang telah menggunakan fasilitas perpipaan lain sebanyak 992 sambungan rumah dari program bantuan pemerintah pusat.

Sedangkan ketersediaan air irigasi di bangunan pengambilan (bendung) masih dalam batas yang cukup, meskipun debit sungai dari DAS yang ada cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sawah yang dilayani jaringan irigasi teknis 18.313 Ha, setengah teknis 8.969 Ha, irigasi sederhana 7.089 Ha, irigasi desa 1.767 Ha, tadah hujan 22.282 Ha dan lainnya 321 Ha.

Ketersediaan dan kualitas air di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dan terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA) serta adanya perubahan tata guna lahan, yang mempengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang aktivitas sosial maupun ekonomi.

d. Telekomunikasi

Dalam era globalisasi perkembangan komunikasi dan media massa sangat cepat, baik radio, televisi dan media cetak. Kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi. Salah satu kemajuan yang terlihat saat ini adalah ketersediaan telekomunikasi yang cukup memadai dan semakin banyak dimiliki oleh masyarakat secara luas, sebagaimana data statistik pada tahun 2005 telah tersedia fasilitas telepon koin 8 unit, telepon kartu 4 unit, wartel 343 unit, warnet 4 unit dan telepon kabel 6.745 pelanggan.

Sementara itu terkait dengan pelayanan pos, di Kabupaten Pati terdapat 1 kantor pos induk yang melayani jasa pengiriman surat menyurat dan paket pos, sedangkan di setiap kecamatan terdapat 1 kantor pos yang berfungsi sebagai kantor pos pembantu.

e. Energi

Penggunaan sumber daya listrik di Kabupaten Pati mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jangkauan pelayanan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mencakup seluruh kecamatan. Pada Tahun 2005 jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pati adalah sebanyak 199.681 pelanggan dan sebagian besar pelanggan listrik PLN merupakan masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan jumlah pelanggan paling sedikit adalah untuk pemasangan daya lebih dari 1.300 watt.

Untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak pada tahun 2005 telah tersedia Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sebanyak 17 unit yang sebagian besar berlokasi di jalur pantura.

Pada daerah terpencil yang memiliki potensi energi terbarukan, dikembangkan biogas sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi gas bagi kebutuhan rumah tangga kecil, sehingga rasio pemenuhan kebutuhan energi gas diharapkan dapat mencapai 100 %.

5. Politik dan Tata Pemerintahan

Perkembangan politik daerah sejak berlakunya otonomi daerah tahun 2000 meningkat cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1999 dan tahun 2004. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung yang pertama kali pada tahun 2004 telah terselesaikan dengan baik dalam satu kali putaran dan tidak menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat, meskipun terdapat kecenderungan masyarakat yang menggunakan hak pilih cenderung menurun.

Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik. Demikian pula terkait dengan pengetahuan dan kesadaran politik bagi masyarakat perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula.

Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu peningkatan dalam mewujudkan *good governance* baik di tingkat Kabupaten Pati, kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan, diantaranya dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum.

6. Keamanan dan Ketertiban

Kabupaten Pati dalam pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban telah mampu menyentuh segala lapisan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai sistem keamanan. Meskipun iklim keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, namun demikian masih terjadi beberapa gangguan keamanan dan ketertiban di beberapa daerah. Pada Tahun 2004 jumlah tindak pidana kriminal sebanyak 203 kasus dan turun di Tahun 2005 menjadi sebanyak 185 kasus. Sedangkan jumlah aparat kepolisian Tahun 2004 sebanyak 676 orang, meningkat di Tahun 2005 menjadi 780 orang dan jumlah pos keamanan polisi di Tahun 2004 ada 5 buah, di Tahun 2005 bertambah menjadi 7 buah. Peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan kemitraan polisi dengan masyarakat.

7. Hukum dan Aparatur

a. Hukum

Sejalan dengan era informasi, peran kepolisian menjadi semakin penting sebagai salah satu alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli dan operasi giat selalu dilaksanakan untuk menjadikan masyarakat tertib dan aman. Pada Tahun 2004 tercatat jumlah perkara yang dilaporkan ada 155 perkara pidana dan 19 perkara perdata. Dari jumlah perkara yang ada belum semua kasus pelanggaran hukum itu dapat terselesaikan. Jumlah perkara pidana yang dapat terselesaikan pada Tahun 2004 sebanyak 109 perkara hal ini berarti bahwa hanya sekitar 70,32% perkara pidana yang dapat terselesaikan. Untuk perkara perdata yang dapat terselesaikan pada Tahun 2004 sebanyak 9 perkara atau sekitar 47,36%.

Seiring dengan semakin luasnya kewenangan daerah dalam otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik telah disusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Sejak tahun 2000- 2005 telah disusun Perda sebanyak 113 buah dan Perbup sebanyak 272 buah.

b. Aparatur

Sehubungan dengan tuntutan perubahan dari sisi regulasi dan perkembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah kabupaten melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan terhadap urusan atau fungsi yang menjadi kewenangannya. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan melakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah, disesuaikan dengan urusan dan fungsi sebagaimana yang

diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pati harus melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan dari pemerintah yaitu sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Kemampuan pembiayaan, sumber daya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki, merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas daerah, dan penyelenggaraan urusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pati didukung oleh 12.057 PNS (2005) yang terdiri dari pejabat fungsional sebanyak 8.474 orang dan yang menduduki jabatan struktural 648 orang serta didukung tenaga staf/teknis sebanyak 2.935 orang.

Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun fungsional.

8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan.

Meningkatnya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk diperlukan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang diimbangi dengan konsistensi dan komitmen dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta penegakan hukum yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

a. Wilayah

Kabupaten Pati terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, 401 (empat ratus) desa dan 5 (lima) kelurahan. Untuk memudahkan dalam pembagian sistem pusat pelayanan, ditentukan sistem perwilayahan pembangunan dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dalam rangka pengembangan wilayah sebagai berikut:

- 1) **Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I)** dengan wilayah meliputi Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus. Pusat Pelayanan SWP I adalah Kota Pati
- 2) **Satuan Wilayah Pembangunan II (SWP II)** dengan wilayah meliputi Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso. Pusat Pelayanan SWP II adalah Kota Trangkil.

- 3) **Satuan Wilayah Pembangunan III (SWP III)** dengan wilayah meliputi Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kec. Gunungwungkal dan Kecamatan Dukuhseti. Pusat Pelayanan SWP III adalah Kota Tayu.
- 4) **Satuan Wilayah Pembangunan IV (SWP IV)** dengan wilayah meliputi Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Batangan. Pusat Pelayanan SWP IV adalah Kota Juwana.
- 5) **Satuan Wilayah Pembangunan V (SWP V)** dengan wilayah meliputi Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong dan Kecamatan Pucakwangi. Pusat Pelayanan SWP V adalah Kota Jakenan.
- 6) **Satuan Wilayah Pembangunan VI (SWP VI)** dengan wilayah meliputi Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo. Pusat Pelayanan SWP VI adalah Kota Kayen.

Sementara itu, pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pati dilakukan melalui pendekatan agropolitan dan pengembangan kawasan pesisir. Pengembangan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Pati dilakukan dengan merancang keterkaitan sumber daya perdesaan dan pesisir dengan industrialisasi dan sistem pemasaran. Pembangunan agribisnis adalah pembangunan keunggulan bersaing, di atas keunggulan komparatif melalui transformasi pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan modal (*capital driven*) menjadi pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan inovasi (*innovation driven*).

Sedangkan dalam rangka pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Pati dilakukan pembagian sistem perwilayahan ruang Kawasan Strategis Pesisir dan Pantai Kabupaten Pati, yaitu terdiri dari : **Wilayah Pengembangan Pesisir (WPP) I** meliputi : Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu), **Wilayah Pengembangan Pesisir (WPP) II** meliputi : Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil dan Kecamatan Wedarijaksa, **Wilayah Pengembangan Pesisir (WPP) III** meliputi : Kecamatan Juwana dan Kecamatan Batangan.

Pengembangan sistem interaksi wilayah, terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah, dengan memantapkan peran Kawasan perkotaan strategis JAKATINATA (Jakenan, Kayen, Pati, Juwana, dan Tayu) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan.

Pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah yang diharapkan akan menciptakan susunan interrelasi dan interkoneksi jaringan prasarana perkotaan dan perdesaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan wilayah,

baik perkotaan maupun perdesaan, serta pengurangan kesenjangan wilayah antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan, dengan menerapkan kebijakan pemerintah khususnya melalui pembangunan ekonomi produktif di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan dalam rangka pemerataan pembangunan.

b. Tata Ruang

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati secara hirarki merupakan bagian dari tata ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati ini menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang mempunyai jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun mengikuti perkembangan pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan dinamika pembangunan di Kabupaten Pati yang perlu disikapi dalam pengelolaan penataan ruang adalah pemerataan perkembangan wilayah antara wilayah bagian utara dengan selatan berupa potensi lokasi, sumber daya alam, dan persebaran jaringan prasaranan. Penetapan kawasan peruntukan industri di wilayah bagian selatan yang kegiatan industri dipandang sebagai kegiatan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan wilayah serta penetapan kawasan kars sebagai potensi riil kegiatan penambangan berperan penting dalam menyediakan sumber air dan ekologi lingkungan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (perumahan, pertokoan, industri, dll) harus diarahkan dengan benar untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya serta pemanfaatan kawasan rawan bencana alam.

c. Pertanahan

Bidang pertanahan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu pertanahan juga memiliki fungsi ekonomis dan sosial, sehingga kepemilikan tanah harus jelas dengan dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP).

Penerbitan sertifikat Hak Milik antara Tahun 2000 hingga 2005 sebanyak 25.550 buah, Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan sebanyak 390 buah, HGU sebanyak 3 buah dan HP sebanyak 88 buah.

Semakin banyaknya jumlah tanah yang bersertifikat dari tahun ke tahun diharapkan dapat menurunkan terjadinya persengketaan tanah atau kasus-kasus perselisihan kepemilikan tanah. Penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah terutama penetapan untuk kawasan peruntukkan pemukiman, pertanian maupun kawasan peruntukkan lainnya. Hal ini terkait erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sesuai dengan Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, kewenangan pemberian izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, tanah *absentee* dan lain-lain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia, akan tetapi masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Luas kawasan hutan yang dipersyaratkan minimal 30% dari luas DAS atau wilayah dengan sebaran yang proporsional.

Pada Tahun 2005 di Kabupaten Pati terdapat areal hutan seluas 20.487,8 Ha yang terbagi berdasarkan fungsi/statusnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa luas areal hutan di Kabupaten Pati pada Tahun 2004 sebesar 20.273 Ha dan Tahun 2005 sebesar 20.487 Ha yang berarti mengalami peningkatan sebesar 214 Ha atau 1,04%. Penambahan luas hutan tersebut merupakan hasil dari usaha reboisasi dan penghijauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong menjadi hutan produksi/hutan produksi terbatas.

Berdasarkan fungsinya, hutan di Kabupaten Pati berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Pada Tahun 2005, hutan produksi mempunyai luasan yang paling besar yaitu sebesar 17.286,2 Ha (84,37%). Sedangkan hutan lindung mempunyai luasan paling kecil yaitu 1.512,00 Ha (7,38%).

Kabupaten Pati tidak memiliki hutan yang berfungsi konservasi. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keberadaan flora fauna yang dilindungi menjadi terancam punah. Di masa mendatang, hutan dengan fungsi konservasi perlu diupayakan keberadaannya di Kabupaten Pati. Selain berperan menjaga keanekaragaman

hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan sekaligus obyek wisata.

Selain berdasarkan fungsi, jenis hutan di Kabupaten Pati juga dikelompokkan berdasarkan hak penguasaannya, yaitu terdiri dari hutan rakyat dan hutan negara. Data luas hutan rakyat di Kabupaten Pati pada Tahun 2005 adalah sebesar 18.053 Ha dengan jumlah produksi kayu sebanyak 12.421,530 m³. Luas hutan rakyat paling besar di Kecamatan Sukolilo yaitu sebesar 4.232 Ha dengan jumlah produksi kayu (jati dan mahoni) sebanyak 4.302,286 m³. Sedangkan luas hutan rakyat paling kecil di Kecamatan Tayu yaitu hanya sebesar 29 Ha.

Luas hutan negara di Kabupaten Pati adalah seluas 21.027 Ha. Hutan negara dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Pucakwangi yaitu sebesar 4.104 Ha. Sedangkan luasan hutan negara paling kecil di Wedarijaksa yaitu hanya sebesar 50 Ha.

B. Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Pati berdasarkan data rekapitulasi kejadian bencana, mempunyai daerah rawan bencana alam yang dibedakan atas :

1. Daerah rawan tanah longsor, terdapat di sekitar lereng Gunung Muria (Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunung Wungkal, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong) maupun wilayah selatan Pati yaitu antara lain di wilayah Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Winong, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen dan Kecamatan Sukolilo.
2. Daerah rawan Abrasi, antara lain di wilayah Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tayu dan Kecamatan Dukuhseti.
3. Daerah rawan bencana banjir, merupakan banjir rutin diantaranya di wilayah Kecamatan Gabus (15 Desa, 4 parah), Kecamatan Juwana (24 desa 9 parah), Kecamatan Jakenan (8 desa 4 parah), Kecamatan Pati (8 desa), Kecamatan Kayen (4 desa), Kecamatan Sukolilo (5 desa 1 parah), Kecamatan Wedarijaksa (2 desa), Kecamatan Trangkil (2 desa), Kecamatan Margoyoso (1 desa), Kecamatan Tayu (1 desa) , Kecamatan Winong (1 desa) dan Kecamatan Margorejo (2 desa) . total jumlah yang terkena banjir adalah 72 desa di 12 kecamatan.
4. Daerah rawan bencana kekeringan antara lain di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Batangan dan Kecamatan Gabus.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan sudah banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan, baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Bidang pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas, dan mobilitas penduduk. Diprediksikan tahun 2025 jumlah penduduk di Kabupaten Pati meningkat menjadi sekitar 1,4 juta jiwa. Untuk itu perlu pengelolaan yang optimal tentang kependudukan yang mencakup pelayanan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pemerataan penyebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Dalam bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.

Penduduk atau sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Pati adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya antara lain mencakup ketersediaan aksesibilitas, pemerataan dan mutu pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta tingkat relevansi pendidikan yang saat ini kondisinya masih rendah. Ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi tantangan dalam rangka meningkatkan layanan. Tidak kalah pentingnya adalah penguatan sumber daya manusia di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya baca bagi sebagian besar masyarakat masih perlu ditingkatkan, sehingga mampu mengikuti perkembangan informasi dan ketertinggalan dari dinamika masyarakat global.

Dibidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan masih dihadapkan pada rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan serta tingkat prestasi olah raga yang mendukung supremasi olah raga baik tingkat daerah maupun nasional.

Terkait dengan keberadaan penduduk miskin termasuk di dalamnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini jumlahnya masih relatif besar, tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan pemenuhan hak-hak dasarnya dan pengentasan kemiskinan itu sendiri. Di bidang kebudayaan, tantangan ke depan yang dihadapi adalah menipisnya nilai moral, budaya, dan agama, sebagai akibat dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta ekses dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi. Tantangan lain di bidang sosial budaya yang tak dapat dikesampingkan adalah terpeliharanya kearifan lokal dalam peradaban, harkat, dan martabat manusia, serta penguatan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan perempuan masih dihadapkan pada ketimpangan keadilan gender di berbagai bidang, utamanya pada akses di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Pada sisi lain rendahnya indeks pembangunan gender, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi, perdagangan orang dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta kurang terpenuhinya hak-hak dasar, kesejahteraan dan perlindungan anak ke depan juga masih menjadi tantangan.

2. Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pati sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai. Oleh karena itu, tantangan pembangunan ekonomi pada dua puluh tahun ke depan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara bertahap kesejahteraan masyarakat pada akhir periode pembangunan dapat mencapai tingkat kesejahteraan minimal setara dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah.

Pembangunan berbasis kewilayahan yang dilaksanakan selama ini telah dapat mendorong kerja sama pembangunan antar daerah secara sinergis, sehingga dapat mendorong daya saing wilayah, terutama dengan wilayah Kabupaten Rembang terkait dengan produksi garam beryodium yang berstandart nasional. Tantangan pembangunan kewilayahan ke depan adalah

meningkatnya kesenjangan pembangunan antar daerah akibat bervariasinya dan terbatasnya potensi sumber daya alam daerah, sehingga perlu diupayakan pengembangan berbagai potensi daerah. Selain itu, tantangan dalam bidang ekonomi adalah mengantisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan), atau bahkan ke sektor tersier (sektor jasa).

Disamping itu telah dirintis kerja sama di tingkat regional antara lain di bidang pariwisata yaitu Pakujembara (Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora) plus Demak yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten se Eks Karesidenan Pati plus Demak untuk lebih bersinergi dalam mengembangkan sektor pariwisata yang saling menguntungkan

Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional.

Meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan, eksplorasi lahan secara berlebihan, dan terjadinya berbagai bencana alam dapat mengganggu ketahanan pangan wilayah dan masyarakat. Tantangan ke depan adalah mengantisipasi, mengendalikan, dan mengurangi secara bertahap permasalahan-permasalahan di atas, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian secara berkelanjutan. Disamping itu membanjirnya produk impor yang murah juga memberikan pukulan terhadap pengusaha kecil/menengah domestik karena kalah bersaing terhadap murahness harga produk barang/jasa yang dihasilkan.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan yang dihadapi dalam bidang iptek adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan serta tuntutan penyediaan *e-government* bagi birokrasi pemerintahan.

4. Sarana dan Prasarana

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana prasarana saat ini, untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut menjadi tantangan yang cukup berat pada masa datang. Pembangunan di bidang perhubungan, seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta perkembangan perekonomian wilayah memiliki banyak tantangan yang salah satu diantaranya ditindaklanjuti dengan perencanaan sistem prasarana perkeretaapian regional sebagai moda alternatif yang menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dua puluh tahun ke depan.

Pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman dua puluh tahun ke depan, ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Terpenuhinya tuntutan kebutuhan hunian di perkotaan dan perdesaan guna mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal merupakan tantangan yang dihadapi dalam bidang perumahan. Selain hal tersebut, tantangan dalam penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai dengan komitmen *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015 harus mampu memenuhi separo dari kebutuhan cakupan layanan.

Tantangan yang berat juga dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat, yang meliputi kemampuan menjaga kondisi prasarana sumber daya air dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat, pelestarian sumber-sumber air dan penampungan air serta terwujudnya kemampuan kelembagaan merupakan keterkaitan antara pengelolaan irigasi dengan ketersediaan pangan yang tidak bisa ditawar lagi.

Dalam pembangunan telekomunikasi tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan jaringan telekomunikasi guna memenuhi cakupan layanan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang listrik dan energi adalah meningkatnya kebutuhan listrik dan energi bagi rumah tangga dan industri dengan pemanfaatan energi listrik

alternatif. Langkah alternatif yang harus dirintis dan dikembangkan adalah penyediaan sumber energi terbarukan untuk mengatasi krisis energi pada masa mendatang.

5. Politik dan Tata Pemerintahan

Perkembangan demokrasi di kabupaten Pati sejak berlakunya otonomi daerah meningkat cukup baik, hal ini dapat diketahui dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 dan tahun 2004. Pembangunan bidang politik dan tata pemerintahan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan budaya politik dan peningkatan kedewasaan politik sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan menguatnya pelaksanaan desentralisasi, tuntutan terhadap kinerja pelayanan publik yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat serta pelaksanaan asas dan norma tata pemerintahan yang baik, menjadi tantangan di masa depan guna memenuhi tingkat kepuasan masyarakat.

Tantangan dalam pembangunan perdesaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga perlu memberikan akses bagi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri.

6. Keamanan dan Ketertiban

Budaya masyarakat Kabupaten Pati yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral dan budi pekerti serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi merupakan pendukung terciptanya kondisi yang tertib dan aman. Perkembangan dan perubahan politik nasional maupun kemiskinan masyarakat akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan perkembangan kehidupan sosial budaya. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban tanpa terlalu bergantung kepada peran pemerintah.

7. Hukum dan Aparatur

Peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah merupakan tantangan yang dihadapi dalam perkembangan waktu ke depan. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat .

Tantangan dalam bidang aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat ke depan adalah terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan publik, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang makin maju dan demokratis, serta meningkatkan sinergi dan harmonisasi dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan dari tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.

8. Wilayah dan Tata Ruang

Peningkatan dinamika dan aktivitas penduduk dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas dan pengelolaan sumber daya alam merupakan aset yang sangat strategis. Untuk itu, penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh *stakeholders*. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah peningkatan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui sistem manajemen pertanahan berbasis masyarakat.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan berbasis kewilayahan yang telah dilaksanakan selama ini dapat mendorong kerja sama pembangunan antar daerah secara sinergis, terkait dengan pembangunan pengembangan kawasan Muria Timur (Kabupaten Kudus dan Jepara) dan pelestarian alam serta kawasan suaka alam di pegunungan Pati Ayam , sedangkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Kawasan Kendeng Utara yang memperhatikan kesinambungan dan kelestarian lingkungan (Kabupaten Grobogan dan Blora).

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan Pemerintah bersama masyarakat melakukan berbagai program dan kegiatan penanganan , karena kedepan permasalahan tersebut akan semakin berat dan kompleks yang

merupakan dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global. Eksploitasi sumber daya alam, baik di wilayah daratan maupun laut yang berlebihan dan tidak memerhatikan kelestarian, serta kurangnya konservasi sumber daya alam, mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta terjadinya potensi bencana longsor, banjir, dan kekeringan.

Eksploitasi air bawah tanah secara besar-besaran dan penambangan golongan "C" yang illegal dan tidak terkendali sampai saat ini masih sering terjadi. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja, berakibat pada tidak pedulinya sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Hal ini berdampak pada penurunan sumber daya alam dan semakin memperparah Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga berdampak terhadap ketersediaan sumber daya air.

B. ISU STRATEGIS

Dari permasalahan pembangunan yang telah di sampaikan tersebut di atas, ada beberapa isu strategis yang harus diprioritaskan dalam rencana pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Program pemberdayaan masyarakat yang belum optimal akan dilaksanakan melalui pendidikan dan ketrampilan yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM.

Dengan kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan daerah untuk lebih maju dan berkembang mandiri dengan segala potensi yang dimiliki dalam menghadapi tantangan perkembangan waktu tanpa harus bergantung sepenuhnya dengan kebijakan pusat maupun provinsi. Demikian juga dengan banyaknya angka pelanggaran hukum menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dibidang hukum perlu mendapatkan penanganan dan pembinaan yang proporsional.

2. Belum optimalnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Diberbagai sektor masih terdapat pelaksanaan program kurang optimal diantaranya di sektor perkebunan dan perikanan terdapat beberapa jenis tanaman komoditas unggulan yaitu kelapa, kelapa kopyor, kopi, kapuk randu, kapas dan cengkeh serta perikanan darat dan laut yang saat ini masih belum

banyak dilakukan pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berlangsung sejak tahun 2000, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan publik, ketertiban hukum dan demokratisasi secara akuntabel, transparan, responsif serta berkeadilan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

Dalam pelayanan publik di Kabupaten Pati telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kesehatan dan *One Stop Service* (OSS) untuk pelayanan perijinan. Kondisi saat ini dalam pelayanan di bidang kesehatan dan administrasi kependudukan masih muncul kendala yang bersifat insidental yang berdampak pada penilaian kurang baik terhadap pelayanan seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Kurangnya penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi infrastruktur Kabupaten Pati pada tahun 2005 secara umum menunjukkan :

a. Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di Kabupaten Pati masih perlu perbaikan untuk mendukung pengembangan wilayah berbasis kelestarian lingkungan hidup guna menunjang perkembangan perekonomian dengan ditandai kelancaran transportasi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan salah satu diantaranya jembatan nasional (Jembatan Juwana I).

b. Sumber Daya Air dan Saluran Irigasi

Pemanfaatan sumber air belum dirasakan oleh semua masyarakat terutama di daerah Pati Selatan dan juga prasarana jaringan irigasi yang masih sangat kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

c. Perhubungan

Sarana perhubungan belum dapat mendukung kelancaran lalu lintas diantaranya masih kurangnya sejumlah *traffic light*, *warning light*, marka jalan, rambu jalan dan penerangan jalan umum.

5. Kurangnya investasi dalam pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Pati cukup banyak, namun investor masih kurang berminat untuk berinvestasi dikarenakan kurangnya peran aktif masyarakat sehingga pengembangan dunia usaha kurang optimal.

6. Kurangnya pengembangan pariwisata dan budaya.

Posisi Kabupaten Pati yang strategis berada di jalur Pantura dengan memiliki 12 obyek wisata dan 15 macam kesenian daerah. Potensi pariwisata di Kabupaten Pati cukup bagus, namun belum optimal pengelolaannya sehingga berakibat kurangnya kunjungan wisatawan, dan baru sebagian yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk pengembangannya.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

A. Visi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Pati saat ini, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang, juga dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Pati seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 - 2025 :

” PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA ”

Visi pembangunan daerah tahun 2005 -2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pati yang harus dapat diukur guna mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan pengertian makna visi secara utuh sebagai berikut :

Pati

Pati, adalah daerah otonom dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bumi

Bumi, merupakan satu kesatuan wilayah dengan potensi alam dan keanekaragaman hayati serta budaya sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Mina

Mina, mempunyai arti filosofi yang menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki potensi wilayah perikanan laut dan perikanan darat yang potensial untuk diolah dan dikembangkan.

Tani

Tani, merupakan gambaran masyarakat dalam mengolah potensi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan maupun kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Sejahtera

Merupakan kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial maupun spirituil, dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu mendukung pembangunan daerah.

B. Misi

Untuk mencapai visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.

Kondisi kehidupan masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya karakter masyarakat yang berperilaku agamis, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang mampu menumbuhkan semangat gotong royong, yang berbudi luhur dengan tetap melestarikan kearifan budaya lokal, bersikap kompetitif dan dinamis, sehingga tercipta kondisi asah, asih dan asuh yang mampu mengayomi rasa aman dan damai serta dengan tetap meningkatkan konsistensi penegakan hukum.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sektor pertanian, perikanan dan pertambangan serta pengembangan IPTEK yang mampu menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai komponen pendukung dalam peningkatan perekonomian daerah berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja tata pemerintahan (*good governance*) yang selalu memenuhi etos kerja partisipasi yang aspiratif, konsistensi peraturan perundangan, transparansi, responsif, demokratis, proporsional yang tidak diskriminatif, efektif dan akuntabel, sehingga terwujud perilaku yang terpuji dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada terciptanya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang dan mampu menumbuhkan kemandirian daerah yang mendapat dukungan dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan.

Yang ditandai dengan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi sebagai dasar dalam pembangunan prasarana dan sarana, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh, sesuai RTRW yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.

Yang ditandai dengan adanya reformasi perijinan investasi yang responsif penuh dengan kemudahan baik dari aspek prosedur, waktu maupun aspek finansial, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif, yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan daya saing daerah.

6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Yang ditandai dengan pengembangan eksistensi budaya daerah dan nilai-nilai tradisional, peningkatan sarana prasarana potensi obyek wisata yang dikelola dan proporsional. Hal tersebut perlu adanya dukungan masyarakat yang mendasarkan pada kearifan lokal.

BAB V
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH

A. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pati tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok pada setiap tahapan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang diimplementasikan dalam beberapa sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berbudaya.

Yang ditandai dengan beberapa indikator :

- a. meningkatnya karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. meningkatnya kualitas, akses, relevansi, tata kelola dan daya saing pendidikan.
- c. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- d. meningkatnya pengarusutamaan gender.
- e. meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga.
- f. meningkatnya dinamika politik yang demokratis dalam ketaatan dan kepastian hukum dan HAM.

2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator :

- a. meningkatnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- b. meningkatnya revitalisasi usaha pertanian dan perikanan .
- c. mengoptimalkan usaha pertambangan.
- d. meningkatnya keamanan stok/penyediaan dan distribusi pangan
- e. meningkatnya prasarana sarana teknologi inovasi industri.
- f. meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. meningkatnya usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan.

3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan indikator :

- a. meningkatnya kualitas tata pemerintahan dan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pemberdayaan BUMD.
- b. meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah.
- c. meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan.
- d. meningkatnya akurasi data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan.
- e. meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, perijinan, kearsipan serta perpustakaan.
- f. meningkatnya fasilitasi pengembangan media dalam pelayanan informasi masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- g. meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan.

4. Terwujudnya prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan indikator :

- a. meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi.
- b. meningkatnya infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan.
- c. meningkatnya revitalisasi penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan.
- d. meningkatnya pelayanan perhubungan.

5. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah dengan indikator :

- a. meningkatnya regulasi yang mendukung investasi.
- b. meningkatnya kesempatan kerja dan pengembangan dunia usaha.
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat pro investasi.
- d. meningkatnya daya saing potensi industri.
- e. meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- f. meningkatnya kerjasama perdagangan dan industri.

6. Terwujudnya pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal dengan indikator:

- a. meningkatnya eksistensi budaya daerah dan nilai-nilai tradisional untuk memperkuat jati diri daerah.

- b. meningkatnya potensi obyek wisata yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional.
- c. meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Guna mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.

Yang ditandai dengan:

- a. peningkatan sikap dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
- c. peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- d. peningkatan profesionalisme dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru.
- e. peningkatan standar hidup yang layak dengan peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan penumbuhan jati diri pribadi.
- f. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesejahteraan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- g. pengembangan system pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga dapat menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
- h. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban demi tegaknya hukum sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang ditandai dengan:

- a. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, berdaya saing serta mampu menembus pasar global.
- b. peningkatan kerja sama strategis dan sinergis antar pelaku usaha untuk mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi.
- c. pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- d. peningkatan perekonomian daerah yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja sebagai bagian penanggulangan kemiskinan.
- e. peningkatan revitalisasi usaha pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- f. optimalisasi usaha pertambangan dengan adanya kepastian regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk pencapaian kemakmuran masyarakat.
- g. peningkatan keamanan stok/penyediaan dan distribusi pangan dengan mengembangkan produktivitas pertanian daerah, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- h. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan.
- i. peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang didukung partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan.
- j. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi guna mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di daerah dan mampu menciptakan usaha peluang mandiri dengan jiwa wirausaha.
- k. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya regenerasi yang dapat diperbaharui dan tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan :

- a. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, tanggung jawab dan menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan guna terwujudnya fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah yang optimal.
- b. peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah yang bersih dan cakap serta ditunjang sarana dan prasarana pelayanan yang memadai untuk menuju tata pemerintahan yang baik.
- c. pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kajian dan analisis disertai dengan data yang valid dan akurat.
- d. peningkatan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat yang difasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat.
- e. peningkatan pembangunan aparatur guna mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- f. peningkatan kelembagaan kearsipan daerah yang didukung sarana prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan dan perpustakaan.
- g. pengembangan sistem informasi manajemen daerah melalui pembangunan dan pengembangan beberapa sistem informasi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Yang ditandai dengan:

- a. peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah, ketersediaan air, jaringan irigasi dengan pengelolaan yang optimal.
- b. peningkatan infrastruktur perumahan yang diarahkan pada pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat.
- c. pengembangan penanganan persampahan berbasis masyarakat.
- d. pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang mendorong pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan.

- e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan beserta perlengkapan pendukung guna mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalulintas.
- f. pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, efisien serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.
- g. peningkatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah disekitarnya yang masih tertinggal.
- h. peningkatan kualitas dan efektifitas serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang penataan ruang.

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah. Yang ditandai dengan:

- a. pengembangan investasi yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjamin kepastian berusaha serta pemenuhan sarana prasarana yang mendukung investasi.
- b. penguatan basis industri yang mempunyai daya saing melalui pendekatan klaster sehingga menumbuhkan keseimbangan peran dan pelaku industri dengan UMKM.
- c. peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha guna mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha perkoperasian.
- d. peningkatan kerja sama antar pelaku usaha berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan mandiri.
- e. peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
- f. pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perijinan yang efisien dan efektif dalam melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat.

6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Yang ditandai dengan:

- a. peningkatan pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur guna membentuk nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat.

- b. peningkatan potensi obyek wisata yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional yang diarahkan untuk pengembangan kuantitas obyek wisata dan didukung dengan pengelolaan yang profesional.
- c. peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang pariwisata untuk memperluas kesempatan kerja guna mendorong kegiatan ekonomi daerah.
- d. peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya berdasarkan pada kearifan lokal dan jati diri melalui pengembangan mekanisme masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- e. pengembangan budaya inovatif berorientasi iptek dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka pengembangan tradisi.

C. TAHAPAN DAN PRIORITAS

Tahapan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan implementasi pada skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan dengan prioritas yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan prioritas disusun sebagai berikut :

1. RPJMD I (TAHUN 2005-2009)

Pada RPJMD Pertama Pembangunan di Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2006-2011 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kelembagaan ekonomi rakyat serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam mencakup tahapan sebagai berikut :

a. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya dengan :

- 1). mengembangkan pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama berdasarkan Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan target 10%.
- 2). pengembangan akses dan mutu pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi serta sarana dan prasarana yang memadai, dengan target 20%.

- 3). peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja, dengan target 20%.
- 4). peningkatan pemerataan, jangkauan pelayanan kesehatan yang didukung oleh persebaran sarana dan prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai, dengan target 20%.
- 5). peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui partisipasi dan kesetiakawanan masyarakat, dengan target 15%.
- 6). peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak untuk memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, dengan target 20%.
- 7). peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi, dengan target 25%.
- 8). peningkatan kreativitas, ketrampilan, olahraga dan kewirausahaan bagi pemuda, dengan target 10%.
- 9). peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui sosialisasi hukum dan HAM, dengan target 10%.
- 10). peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM, dengan target 10%.

b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan :

- 1). pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui kerjasama ekonomi antar UMKM dan koperasi, dengan target 20%.
- 2). peningkatan revitalisasi usaha pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna memperkuat posisi tawar petani melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kelestariaanya, dengan target 20%.
- 3). pengembangan usaha pertambangan melalui identifikasi potensi tambang, dengan target 10%.
- 4). peningkatan kesinambungan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan serta keamanan distribusi pangan, dengan target 15%.

- 5). pengembangan produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan prasarana sarana pendukung, dengan target 15%.
- 6). peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati untuk penyusunan profil daerah, dengan target 15%.
- 7). peningkatan sosialisasi dan pembentukan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana, dengan target 20%.
- 8). peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dengan target 15%.
- 9). peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan melalui identifikasi lahan dengan melibatkan masyarakat, dengan target 15%.

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan :

- 1). pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan target 10%.
- 2). peningkatan aparatur melalui kesadaran budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa untuk menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan target 15%.
- 3). pengembangan pelayanan publik melalui kompetensi dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pelayanan dasar, dengan target 20%.
- 4). pengembangan sistem perencanaan dengan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan target 25%.
- 5). penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW disertai dengan pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan target 10%.
- 6). peningkatan penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan profesionalisme, standar kompetensi dan peningkatan kesejahteraan aparatur, dengan target 5%.

d. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan :

- 1). pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendorong pelayanan peningkatan arus barang dan penumpang yang ditunjang fasilitas sarana keselamatan pendukungnya, dengan target 10%.
- 2). pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi dengan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dengan target 10%.
- 3). pengembangan infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas umum dan sosial, bekerjasama dengan pihak ke tiga, dengan target 10%.
- 4). peningkatan revitalisasi penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana detail tata ruang ibukota kecamatan, dengan target 10%.
- 5). pengembangan sarana prasarana telekomunikasi melalui cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat dengan pembentukan kelembagaan maupun peraturannya, dengan target 10%.
- 6). penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, dengan target 5%.

e. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah dengan :

- 1). peningkatan regulasi, infrastruktur dan promosi potensi serta peluang investasi yang mendorong daya saing daerah dalam pengembangan dunia usaha, dengan target 10%.
- 2). pengembangan investasi dan akses pasar dalam memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, dengan target 5%.
- 3). peningkatan peran serta masyarakat dan LSM dalam mendukung investasi, dengan target 5%.
- 4). pengembangan daya saing potensi industri melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dengan penyediaan infrastruktur pendukung, dengan target 5%.
- 5). pengembangan kerjasama perdagangan dan industri dengan pembentukan kelembagaan dalam rangka memasuki perdagangan bebas, dengan target 5%.

f. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal dengan :

- 1). pengembangan pembentukan karakter dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri dengan penyelenggaraan festival budaya daerah untuk menunjang pariwisata daerah, dengan target 5%.
- 2). peningkatan potensi obyek wisata yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional ditunjang sarana prasarana yang memadai bekerjasama dengan pihak ketiga guna pengembangan obyek wisata, dengan target 5%.
- 3). pengembangan pelayanan bidang usaha jasa pariwisata, dengan target 5%.

2. RPJMD II (TAHUN 2010-2014)

Pada tahapan pelaksanaan pembangunan jangka menengah kedua yang berlandaskan pada pelaksanaan tahapan pembangunan pertama, diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan sebagai berikut :

a. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya dengan prioritas sebagai berikut :

- 1). peningkatan perilaku masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, pemahaman nilai-nilai ajaran agama dengan target 10%.
- 2). peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi serta sarana dan prasarana yang memadai dengan target 20%.
- 3). peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja dengan target 20%.
- 4). peningkatan pemerataan, jangkauan pelayanan kesehatan yang didukung oleh pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan dengan target 20%.
- 5). peningkatan profesionalitas penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sumber daya aparatur pelaksana dengan target 15%.
- 6). peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memperkuat kelembagaan, pengarusutamaan gender, anak dan remaja dalam pembangunan sesuai dengan norma agama dan falsafah Pancasila dengan target 20%.

- 7). peningkatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi dengan target 15%.
- 8). peningkatan kreativitas, ketrampilan, olahraga dan kewirausahaan bagi pemuda dengan target 15%.
- 9). peningkatan kesadaran aparat dan masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum dan HAM dengan target 10%.
- 10). peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM dengan target 10%.

b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- 1). peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui kerjasama ekonomi antar UMKM dan koperasi untuk mendorong daya saing dengan target 20%.
- 2). peningkatan usaha pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna memperkuat posisi tawar petani melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kelestariaannya dengan target 15%.
- 3). peningkatan usaha pertambangan melalui fasilitasi regulasi pertambangan yang berbasis kelestarian lingkungan dengan target 15%.
- 4). peningkatan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan serta keamanan distribusi pangan yang berkesinambungan dengan target 20%.
- 5). peningkatan produktivitas dan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan prasarana sarana pendukung dengan target 20%.
- 6). peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya alam/genetik dengan target 15%.
- 7). pengembangan teknologi mitigasi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan target 15%.

- 8). peningkatan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dengan target 20%.
- 9). peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan melalui penanaman bibit tanaman yang unggul melibatkan masyarakat dengan target 20%.

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan :

- 1). peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target 20%.
- 2). peningkatan kualitas aparatur melalui kesadaran budaya kerja yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa untuk menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik dengan target 15%.
- 3). peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kompetensi dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar dengan target 15%.
- 4). peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan dengan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan target 20%.
- 5). peningkatan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW disertai dengan kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan target 10%.
- 6). peningkatan kualitas pemerintahan didukung dengan pengembangan profesionalisme, standar kompetensi dan peningkatan kesejahteraan aparatur dengan target 10%.

d. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan :

- 1). peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan guna mendorong pelayanan peningkatan arus barang dan penumpang yang ditunjang fasilitas sarana keselamatan pendukungnya dalam rangka keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan target 20%.

- 2). peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi dengan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air dengan target 20%.
- 3). peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas umum dan sosial, bekerja sama dengan pihak ke tiga dengan target 15%.
- 4). peningkatan kualitas penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan melalui pemanfaatan ruang di ibukota kecamatan didukung peran serta masyarakat dengan target 15%.
- 5). peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan non telekomunikasi dengan target 10%.
- 6). peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dengan target 20%.

e. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah:

- 1). penerapan regulasi, peningkatan infrastruktur dan promosi potensi serta peluang investasi yang mendorong daya saing daerah dalam pengembangan dunia usaha dengan target 15%.
- 2). peningkatan investasi dan akses pasar dalam memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan target 15%.
- 3). peningkatan peran serta masyarakat dan LSM dalam mendukung investasi melalui sosialisasi manfaat investasi dengan target 10%.
- 4). peningkatan daya saing potensi industri melalui kemitraan strategis antar pelaku industri dengan target 20%.
- 5). peningkatan kerjasama perdagangan dan industri melalui penguatan kelembagaan dalam rangka era perdagangan bebas dengan target 10%.

f. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal :

- 1). peningkatan pembentukan karakter dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri dengan penyelenggaraan festival budaya daerah untuk menunjang pariwisata daerah dengan target 10%.
- 2). peningkatan potensi obyek wisata yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional ditunjang sarana prasarana yang memadai bekerjasama dengan pihak ketiga guna pengembangan obyek wisata dengan target 10%.

- 3). peningkatan kualitas pelayanan bidang usaha jasa pariwisata melalui pembangunan sarana pendukung di bidang pariwisata dengan target 10%.

3. RPJMD III (TAHUN 2015-2019)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan capaian serta sebagai kelanjutan dari tahapan pertama dan kedua, tahapan ketiga diarahkan pada penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan mencakup upaya sebagai berikut:

a. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya dengan prioritas sebagai berikut:

- 1). penguatan budaya masyarakat guna membentuk perilaku masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan dan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, dengan target 10%.
- 2). penguatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkompentensi serta sarana dan prasarana yang memadai, dengan target 20%.
- 3). peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi, dengan target 20%.
- 4). peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dengan target 20%.
- 5). penguatan sistem kelembagaan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan, dengan target 15%.
- 6). penguatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja dalam pembangunan sesuai dengan norma agama dan falsafah Pancasila, dengan target 15%.
- 7). penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi mandiri, dengan target 10%.
- 8). penguatan peran pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, ketrampilan, olahraga dan kewirausahaan, dengan target 15%.

- 9). penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan target 10%.
- 10). penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM, dengan target 10%.

b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan :

- 1). penguatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan target 20%.
- 2) penguatan usaha pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna memperkuat posisi tawar petani melalui pemanfaatan lahan secara optimal dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kelestariannya, dengan target 20%.
- 3). penguatan usaha pertambangan melalui penerapan regulasi pertambangan, dengan target 20%.
- 4). penguatan kesinambungan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan serta keamanan distribusi pangan, dengan target 20%.
- 5). penguatan produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan teknologi, kelembagaan dan prasarana sarana pendukung yang memadai, dengan target 20%.
- 6). pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan target 20%.
- 7). penguatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan resiko bencana, dengan target 20%.
- 8). penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan dan penegakan hukum lingkungan, dengan target 20%.
- 9). penguatan manajemen rehabilitasi hutan dan konservasi lahan melalui pola penanaman bibit tanaman yang unggul dengan melibatkan masyarakat, dengan target 20%.

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan prioritas sebagai berikut :

- 1). penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan target 20%.
- 2). penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa untuk mendukung tata pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan target 20%.
- 3). penguatan sistem dan akses kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan target 20%.
- 4). penguatan sistem perencanaan dengan berorientasi pada optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam pembangunan daerah, dengan target 20%.
- 5). peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan target 25%.
- 6). penguatan sistem dan kualitas pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme, standar kompetensi dan kesejahteraan aparatur dengan target 10%.

d. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan :

- 1). peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan guna mendorong peningkatan manajemen pelayanan transportasi barang dan penumpang yang ditunjang efisiensi penyelenggaraan transportasi, dengan target 10%.
- 2). penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, dengan target 15%.

- 3). penguatan infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan fasilitas umum dan sosial, bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan target 15%.
- 4). peningkatan kualitas penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan melalui pengembangan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di ibukota kecamatan didukung peran serta masyarakat, dengan target 20%.
- 5). penguatan peran penyelenggaraan telekomunikasi melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan non telekomunikasi, dengan target 20%.
- 6). peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan terutama terminal dan pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, dengan target 20%.

e. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah:

- 1). penguatan regulasi yang didukung dengan peningkatan infrastruktur dan promosi potensi serta peluang investasi untuk mendorong daya saing daerah dalam pengembangan dunia usaha, dengan target 20%.
- 2). penguatan investasi dan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, dengan target 20%.
- 3). penguatan peran serta masyarakat dan LSM dalam mendukung investasi melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat tentang manfaat investasi, dengan target 15%.
- 4). penguatan daya saing industri melalui pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif guna mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek, dengan target 15%.
- 5). penguatan sektor perdagangan dan perindustrian guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam rangka pengamanan perdagangan bebas, dengan target 15%.

f. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal:

- 1). penguatan karakter dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang, dengan target 10%.
- 2). penguatan sektor kepariwisataan yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional ditunjang sarana prasarana yang memadai bekerjasama

dengan pihak ketiga guna peningkatan pengembangan obyek wisata, dengan target 10%.

- 3). penguatan akses pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana pariwisata melalui peningkatan pembangunan sarana pendukung di bidang pariwisata, dengan target 15%.

4. RPJMD IV (TAHUN 2020-2024)

Berlandaskan pada pelaksanaan pencapaian serta kelanjutan dari RPJMD Pertama, RPJMD Kedua dan RPJMD Ketiga untuk mewujudkan masyarakat Pati Bumi Mina Tani Sejahtera melalui akselerasi pembangunan diberbagai bidang serta berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan tahapan sebagai berikut:

a. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya dengan prioritas sebagai berikut :

- 1). pemantapan budaya masyarakat guna membentuk perilaku masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan target 15%.
- 2). pemantapan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu yang didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi serta sarana dan prasarana yang memadai, dengan target 20%.
- 3). pemantapan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan iptek, jenjang pendidikan tinggi dan pangsa pasar kerja, dengan target 20%.
- 4). pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendayagunaan tenaga kesehatan yang profesional didukung sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang handal, dengan target 20%.
- 5). pemantapan sistem kelembagaan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dengan target 10%.
- 6). pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma agama dan falsafah Pancasila, dengan target 10%.
- 7). pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri, dengan target 10%.
- 8). pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, ketrampilan, olahraga dan kewirausahaan dengan pemanfaatan teknologi, dengan target 10%.

- 9). pemantapan sistem penegakan hukum yang adil guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan target 10%.
- 10). pemantapan peran masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM, dengan target 10%.

b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- 1). pemantapan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui peningkatan akses pasar dalam mendorong daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan target 20%.
- 2). pemantapan usaha pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kelestariannya, dengan target 20%.
- 3). pemantapan usaha pertambangan melalui penerapan regulasi pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam, dengan target 15%.
- 4). pemantapan kesinambungan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan serta keamanan distribusi pangan, dengan target 20%.
- 5). pemantapan produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pengembangan teknologi, kelembagaan dan prasarana sarana pendukung yang memadai, dengan target 20%.
- 6). pelestarian sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan target 15%.
- 7). pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan resiko bencana, dengan target 20%.
- 8). pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan, dengan target 20%.
- 9). pemantapan manajemen rehabilitasi hutan dan konservasi lahan didukung regulasi konservasi hutan dan lahan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan target 20%.

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan prioritas sebagai berikut :

- 1). pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan target 20%.
- 2). pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa untuk mendukung tata pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan target 20%.
- 3). pemantapan sistem dan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Prima dibidang pelayanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan target 20%.
- 4). pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis, dengan target 15%.
- 5). pemantapan penatagunaan pertanahan yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan target 20%.
- 6). pemantapan sistem dan kualitas pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme, standar kompetensi dan kesejahteraan aparatur, dengan target 20%.

d. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan dengan :

- 1). pemantapan sistem dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan guna mendorong peningkatan manajemen pelayanan transportasi barang dan penumpang yang ditunjang efisiensi penyelenggaraan transportasi yang andal, dengan target 15%.
- 2). pemantapan kelembagaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana, sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, dengan target 15%.
- 3). pemantapan infrastruktur perumahan dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan fasilitas umum dan sosial, bekerjasama dengan pihak ke tiga, dengan target 20%.

- 4). pemantapan kualitas penataan dan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan melalui pengembangan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di ibukota kecamatan didukung peran serta masyarakat, dengan target 20%.
- 5). pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, dengan target 20%.
- 6). pemantapan kualitas sarana dan prasarana perhubungan terutama terminal dan pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, dengan target 20%.

e. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah:

- 1). pemantapan regulasi investasi yang didukung dengan peningkatan infrastruktur dan promosi potensi investasi daerah dalam pengembangan dunia usaha untuk kesejahteraan masyarakat, dengan target 20%.
- 2). pemantapan kondisi perekonomian daerah dibidang investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam memperluas kesempatan kerja, pengangguran dan penanggulangan kemiskinan, dengan target 15%.
- 3). pemantapan peran masyarakat dan LSM dalam mendukung investasi yang didukung keterpaduan aparat dan masyarakat tentang manfaat investasi, dengan target 15%.
- 4). pemantapan daya saing industri yang didukung oleh produk-produk unggulan daerah yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, dengan target 20%.
- 5). pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perdagangan dan perindustrian didukung dengan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam rangka pengamanan perdagangan bebas, dengan target 20%.

f. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal:

- 1). pemantapan karakter masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri berlandaskan pada budaya lokal yang memiliki ketahanan terhadap pengaruh dinamika perubahan budaya, dengan target 15%.
- 2). pemantapan sektor kepariwisataan yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional ditunjang sarana prasarana yang memadai

bekerjasama dengan pihak ketiga guna peningkatan pengembangan obyek wisata, dengan target 15%.

- 3). pemantapan kualitas akses pelayanan bidang usaha jasa dan usaha sarana pariwisata melalui peningkatan pemanfaatan sarana pendukung di bidang pariwisata, dengan target 15%.

BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah dijadikan sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pati selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi **“Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”** yang diimplementasikan dalam 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab. IV, perlu didukung dengan :

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat, bersih dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
3. Keberpihakan pembangunan daerah kepada rakyat; dan
4. Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (masyarakat, kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pati.

Untuk mengetahui hasil dari setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD I, RPJMD II, RPJMD III dan RPJMD IV pada Bab. V dokumen RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, diperlukan adanya evaluasi keberhasilan yang dilaksanakan pada masing-masing akhir periode.

RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pati

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N,